

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Lagal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Allan Coffey, 1994, *An Introduction to Criminal Justice System and Process*, New York Jersey Prentice, Engelwood Cliff.
- Andi Hamzah, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- _____, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Arin Karniasari, “*Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis Dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum*” Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pascasarjana, 2012.
- Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa, Suatu Pencarian*, Mahkamah Agung RI.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia.
- Chairul Arrasyid, 2004, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa Di tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Effendi Marwan, 2005, *Kejaksaan Republic Indonesia Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jarkarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Evi Hartanti. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Semarang, Sinar Grafika.

- Harian Jurnal Nasional, "Soal Kasus Sandal Jepit, Kejagung Hanya Berharap Bisa Segera Tuntas", diterbitkan Selasa, 03 Januari 2012.
- Harian Media Indonesia, diterbitkan Selasa, 16 Mei 2006/No.9276/Tahun XXXVII.
- Hernold Ferry Makawimbang, *kerugian keuangan Negara*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2014.
- H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Malang, UMM Press, 2005.
- I Dewa Gede Atmadja, 1993, "Manfaat Filsafat Hukum Dalam Studi Ilmu Hukum," dalam *Kerta Patrika*, Nomor 62-63 Tahun XIX Maret-Juni, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University press, 1973, London: Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlaq*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Laporan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana", Jakarta, 2006.
- Lexy J.Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam.
- Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2013.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2002. *Teori dan Praktik Membuat Surat Dakwaan*. Jakarta: Ghlmia Indonesia.
- Mien Rukmini. 2007. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung, Alumni.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muchsini, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta.

- Muhammad Arif Sahlepi, 2009, *Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana*, Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi Dan Arif Nawawi, 1996, *Teori–Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- _____, 2006, *Pembahasan Permasalahn Dan Penerapan KUHAP, (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan PK)*, Jarkarta, Sinar Grafik.
- _____, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta, Sinar Grafika
- Oemar Seno Adji, Tanpa Tahun, *Prasarana Pada Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta Seruling Masa.
- Osman Simanjuntak, *Tehnik Penuntutan Dan Upaya Hukum*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1995.
- _____, 2002. *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*. Jakarta, Gramedia
- O. C Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa selaku penyidik Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, P.T Alumni, 2006.
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009).
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Jakarta, Sumber Ilmu Jaya.
- R.M. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- R. Yunia dan Kuhne, *Kamus Jerman-Indonesia*, Jakarta, Transmedia, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta.

Soerjono dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soeparman Parman, 2007, *Pengantar Hak Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Bandung, PT Rafika Aditama.

Soetandyo Wignyosoebroto, 1997, *Hukum dan Metoda-Metoda Kajiannya*, dalam Kumpulan Bahan Penataran Metode Penelitian Hukum, FH UI, Jakarta.

_____, 1989, *Pengolahan dan Analisis Data*, dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta.

Sue Titus Reid, 1987, *Criminal Justice Procedure and Issues*, New York, West Publishing Company.

Sumadi Suryabrata, 1987, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta.

Syafruddin Kalo, 2007, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Darma Agung.

Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.

Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Radja GrafindoPersada, Jakarta.

B. Data Internet

A'an Efendi, *Deponering dan Kepentingan Umum*, <http://www.gresnews.com/berita/opini/91123-deponering-dan-kepentingan-umum/0/>, diakses pada tanggal 6 Januari 2017.

Beritasatu.com, *Jaksa Agung Deponering Bibitchandra Bersifat Final*, <http://www.beritasatu.com/hukum/165190-jaksa-agung-deponeering-bibitchandra-bersifat-final.html>. Diakses tanggal 30 Mei 2016.

Chairul Huda, *Memaknai Arti Deponering*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5731c8f006059/begini-ahli-kuhap-maknai-iseponering-i-demi-kepentingan-umum>, diakses pada tanggal 6 Januari 2016.

Deny Hariyatna, *Beberapa Catatan Tentang Asas Oportunitas*, <https://hariyatnadeny.wordpress.com/2011/04/08/hello-world/>, diakses pada tanggal 6 Januari, 2017.

Detik.com, *Deponering Bibit Chandra Resmi Ditandatangani*, <http://news.detik.com/berita/1553619/deponering-bibit-chandra-resmi-ditandatangani>. Diakses tanggal 30 Mei 2016.

Hukum.Online.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cecd0c51fb6b/bahasa-hukum-iseponeringi-atau-ideponeringi>. Diakses tanggal 1 Juni 2016.

I Gede Pantja Astawa, Ahli Sebut Seponering Langgar Asas Legalitas, <http://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt57456ec96e73e/ahli-sebut-seponering-langgar-asas-legalitas>, diakses pada tanggal 6 Januari 2016.

Kejaksaan Republik Indonesia, *Sejarah Kejaksaan RI* <http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=1543&bc= Diakses tanggal 30 Mei 2016.

Mudzakir, *Deponering Demi Kepentingan Umum Paramateter Yang Tak Jelas*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e2785c2867c/seponering-demi-kepentingan-umum--parameter-yang-tak-jelas>, diakses pada tanggal 6 Januari 2017.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kejaksaan Republik Indonesia, yang dilanjutkan dalam Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan terakhir

diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana